

**SUMBER DAYA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPARIWISATAAN
DI OBJEK WISATA BUDAYA
RUMAH BETANG ENSAID PANJANG
KABUPATEN SINTANG**

Nurhalimah
NIM: E.01110009

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura
Pontianak
Email: nurzhola@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sumber daya dalam implementasi kebijakan kepariwisataan di objek wisata budaya Rumah Betang Ensaid Panjang. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Permasalahan yang ada di objek wisata ini menarik untuk diteliti mengingat masih ada beberapa hal yang menyebabkan kurang efektifnya kebijakan tersebut dan berdampak pada kurang berkembangnya objek wisata budaya Rumah Betang Ensaid Panjang. Adapun faktor yang menyebabkan kurang efektifnya kebijakan kepariwisataan di Rumah Betang Ensaid Panjang yaitu kondisi sumber daya. Sumber daya manusia yang kurang berkualitas dan sumber daya modal yang masih kurang menyebabkan pengembangan di objek wisata Rumah Betang menjadi penghambat. Selain itu, ukuran dan tujuan kebijakan yang terlalu luas, karakteristik agen pelaksana yang belum menonjol, kurang sikap/kecenderungan (*dispositon*) para pelaksana serta belum adanya komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana yang baik juga mempengaruhi pengembangan di Rumah Betang Ensaid Panjang. Faktor lingkungan seperti kondisi geografis serta kondisi ekonomi, sosial, politik dan budaya juga menyebabkan kebijakan kepariwisataan kurang efektif. Selain itu ada faktor lain seperti komitmen daerah, ketersediaan infrastruktur, keterlibatan pihak swasta, kesadaran masyarakat juga menyebabkan kurang efektifnya kebijakan kepariwisataan di objek wisata budaya Rumah Betang Ensaid Panjang. Dari berbagai faktor tersebut diatas maka harapan kedepannya Dinas kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Sintang dapat membuat kebijakan strategis yang dapat mengembangkan objek wisata Rumah Betang Ensaid Panjang.

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi, Kepariwisataan, Rumah Betang.

ABSTRACT

The purpose of this writing is to investigate and analyze the resources in the implementation of tourism policies in cultural attractions Rumah Betang Ensaid Panjang. This type of research is exploratory qualitative approach. The problems that exist in this exciting attraction for investigation remember there are still some things that cause a lack of effectiveness of the policy and less impact on the development of cultural attractions Rumah Betang Ensaid Panjang. The factors that cause a lack of effective tourism policy at the Rumah Betang Ensaid Panjang that resource conditions. Human resources are lacking in quality and capital resources are still lacking in attraction led to the development of Rumah Betangis the bottleneck. In addition, the size and purpose of the policy is too broad, the characteristics of the implementing agencies that have not been prominent, less attitude/tendency (disposition) of the implementers and the lack of communication between organizations and implementing good activity also affect development in Rumah Betang Ensaid Panjang. Environmental factors such as geographical conditions as well as economic, social, political and cultural tourism policies also lead to less effective. In addition there are other factors such as the commitment of the region, the availability of infrastructure, private sector involvement, public awareness has also led to a lack of effective tourism policy at the cultural attractions Rumah Betang Ensaid Panjang. Of the various factors mentioned above, the culture and expectations of future Department of Tourism Sintang district can make strategic policies to develop the attraction Rumah Betang Ensaid Panjang.

Keywords : Policy, Implementation, Tourism, Rumah Betang .



A. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan kegiatan dinamis dan melibatkan banyak manusia serta menghidupkan kembali berbagai bidang usaha. Pariwisata pada abad ini telah menjadi industri terbesar dan telah menjadi sektor andalan di dalam pembangunan ekonomi berbagai negara. Indonesia pada tahun 2013 menduduki peringkat ke - 70 dalam daftar daya saing pariwisata global *World Economic Forum* (WEF) dan posisi tersebut naik 4 tingkat dari posisi ke-74 pada 2011. Naiknya peringkat tersebut merupakan langkah awal untuk mengembangkan berbagai potensi pariwisata di Indonesia, sehingga kedepannya akan meningkatkan kualitas pariwisata yang berdaya saing dengan negara lain di dunia.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yang mempunyai keanekaragaman baik itu dari aspek budaya, ekonomi, sejarah bahkan keanekaragaman berbagai tempat pariwisata yang dapat dikembangkan. Selain itu, Kabupaten Sintang juga menempati sebagai posisi strategis dalam pariwisata baik dalam konteks nasional, regional dan internasional. Kabupaten Sintang berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur) serta berlanjut ke Brunei Darussalam. Dengan demikian kawasan ini akan menjadi gerbang keluar masuk barang dan orang (*outlet*) dari dan ke Sarawak maupun Brunei Darussalam melalui jalan darat. Kabupaten Sintang adalah satu dari sekian banyak kabupaten yang memiliki potensi pariwisata yang tidak kalah menarik dengan daerah tujuan wisata lainnya. Potensi pariwisata tersebut terbukti dengan adanya beberapa pilihan tempat wisata di Kabupaten Sintang yang dapat dijadikan sebagai tujuan wisata. Kabupaten Sintang mempunyai sebelas objek wisata yang terdiri dari tiga jenis objek wisata, yaitu wisata alam, wisata budaya dan wisata religi.

Tempat wisata di Kabupaten Sintang yang memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan ialah Rumah Betang Ensaid

Panjang. Potensi seni budaya yang ada di Rumah Betang Ensaid Panjang ialah sanggar batu nantai, seni pahat, seni ukir, bekana, bedudu, ngasuk (membuat api), numbuk padi, tutup pangkak, gasing, nyumpit dan adanya kegiatan seperti panai besi, anyaman, tenun serta besilat. Rumah Betang Ensaid Panjang merupakan rumah betang satu – satunya yang masih bertahan di Kabupaten Sintang. Rumah Betang di Desa Ensaid Panjang ini adalah rumah betang asli yang masih dihuni oleh masyarakat suku Dayak. Keunikan dari Rumah Betang Ensaid Panjang ialah dari segi bangunannya yang belum tersentuh oleh arsitektur modern dan bahan – bahan yang digunakan tidak menggunakan paku, melainkan menggunakan tali.

Keadaan pegawai menurut pangkat dan golongan dimana terdapat 3 orang yang menduduki pangkat golongan IV, 26 orang menduduki pangkat golongan III, dan 14 orang menduduki pangkat golongan II, sedangkan pegawai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang bukan PNS berjumlah 21 orang terdiri dari 5 orang juru pelihara BCB dan 16 orang Tenaga Kontrak kebersihan dan supir. Dapat diambil kesimpulan bahwa pada Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang memiliki 64 pegawai dimana 21 pegawai merupakan tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sedangkan tenaga kerja yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 43 orang.

Kualitas sumber daya aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus ditingkatkan guna terwujudnya sumber daya manusia yang profesional. Hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang.

Oleh karena itu fokus penelitian ini ialah pada faktor – faktor yang menyebabkan

implementasi kebijakan kepariwisataan di objek wisata budaya Rumah Betang Ensaid Panjang Kabupaten Sintang kurang efektif, dengan rumusan masalah yaitu faktor – faktor apa yang menyebabkan implementasi kebijakan kepariwisataan di objek wisata budaya Rumah Betang Ensaid Panjang Kabupaten Sintang kurang efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan kepariwisataan di objek wisata budaya Rumah Betang Ensaid Panjang Kabupaten Sintang kurang efektif.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Nugroho Riant, 2012:685) adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Maksudnya ialah bahwa berbagai upaya atau program yang dilakukan oleh pemerintah merupakan implementasi dari suatu kebijakan yang sebelumnya telah dirumuskan. Selanjutnya Implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho (2004:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino Leo, 2008:139), merupakan tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu atau pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dari definisi implementasi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu :

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Laster dan Stewart juga mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*output*). Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino Leo, 2008:142) mengatakan bahwa setidaknya ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, diantaranya adalah :

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan.

- b. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap – tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

- c. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik dan implementasi kebijakan ini akan banyak dipengaruhi oleh ciri – ciri yang tepat serta dengan para agen pelaksananya.

- d. Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tindakan kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

e. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak – pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahan – kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan ke kondusifan lingkungan eksternal.

2. Pariwisata

Menurut Undang Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan kepariwisataan adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha. Sedangkan yang dimaksud dengan pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat berubah – ubah dan dapat melibatkan banyak manusia serta menghidupkan kembali berbagai bidang usaha.

Menurut Ismayanti (2010:1) yang dimaksud dengan pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha.

Nurhalimah

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

Menurut Leiper Cooper et.al (dalam Ismayanti 2010 : 1-3) terdapat tiga elemen utama yang menjadikan kegiatan tersebut bisa terjadi. Antara lain dengan adanya komponen utama:

1) Wisatawan

Ia adalah aktor dalam kegiatan wisata. Berwisata menjadi sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi dan mengingatkan masa-masa dalam kehidupan.

2) Elemen Geografi

Pergerakan wisatawan berlangsung pada tiga area geografi, yaitu:

a. Daerah Asal Wisatawan (DAW)

Daerah tempat asal wisatawan berada, tempat ketika ia melakukan aktivitas keseharian seperti bekerja, belajar, tidur dan kebutuhan dasar lain. Rutinitas itu sebagai pendorong untuk memotivasi seseorang berwisata. Dari Daerah Asal Wisatawan (DAW), seseorang dapat mencari informasi tentang obyek dan daya tarik wisata yang diminati, membuat pemesanan dan berangkat menuju daerah tujuan.

b. Daerah Transit (DT)

Daerah Transit (DT) merupakan hal yang penting dalam pariwisata. karena setiap wisatawan pasti akan melewati daerah ini. Hal inilah yang membuat negara – negara seperti Singapura dan Hong Kong berupaya menjadikan daerahnya multifungsi yaitu sebagai Daerah Transit (DT) dan Daerah Tujuan Wisata (DTW).

c. Daerah Tujuan Wisata (DTW)

Daerah ini sering dikatakan sebagai *sharp end* (ujung tombak) pariwisata. di Daerah Tujuan Wisata (DTW) ini dampak pariwisata sangat dirasakan

sehingga dibutuhkan perencanaan dan strategi manajemen yang tepat.

3) Industri Pariwisata

Industri pariwisata merupakan industri yang menyediakan jasa, daya tarik, dan sarana wisata. Industri merupakan unit-unit usaha atau bisnis didalam kepariwisataan dan tersebar di ketiga area geografi.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian eksploratif yaitu penelitian sosial yang tujuannya untuk memberikan sedikit definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan pendekatan kualitatif menurut Creswell (dalam Riant Nugroho, 2012:234) merupakan pendekatan yang pada dasarnya bertujuan untuk menemukan (atau paling tidak menemukan sebuah teori baru) dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara induktif.

Waktu penelitian ini dilaksanakan 6 bulan dari bulan Oktober 2013 – Maret 2014. Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di desa Ensaid Panjang, Kecamatan Kelay Permai Kabupaten Sintang. Tempat Wisata yang menjadi objek penelitiannya ialah Rumah Betang yang berada di desa Ensaid Panjang. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kebijakan kepariwisataan di objek wisata budaya rumah betang di Desa Ensaid Panjang Kabupaten Sintang. Subjek dalam penelitian ini diambil secara *purposive*. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah (a) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang, (b) Kepala Seksi Pengembangan Potensi Wisata, (c) Kepala Desa Ensaid Panjang, Kecamatan Kelay Permai, (d) Kepala Dusun Ensaid Baru, Desa Ensaid Panjang, (e) Masyarakat serta pengunjung di sekitar kawasan objek wisata budaya Rumah Betang yang berjumlah 6

orang. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun alat (instrumen) pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini antara lain panduan observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk menguji data yang diperoleh dalam penelitian itu sah dan benar maka diperlukan uji kredibilitas.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor – Faktor yang Menyebabkan Kurang Efektifnya Kebijakan Kepariwisataan di Objek Wisata Budaya Rumah Betang Ensaid Panjang

A. Faktor Internal

a. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan yang memang realistis dengan kondisi kebudayaan setempat. Begitu juga halnya dengan ukuran dan tujuan yang hendak dicapai oleh Kabupaten Sintang khususnya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tujuan kepariwisataan yang hendak dicapai pemerintah daerah Kabupaten Sintang harus nyata dan sesuai dengan kondisi lingkungan sekitarnya yaitu kondisi lingkungan dan kondisi budaya Desa Ensaid Panjang. Sehingga tujuan kepariwisataan tersebut dapat dicapai dengan baik. Selain itu tujuan yang diinginkan jangan terlalu ideal sehingga sulit dalam pencapaiannya.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Kabupaten Sintang sudah cukup ideal dan sesuai dengan kondisi lingkungan di Desa Ensaid Panjang Kabupaten Sintang karena dalam pelaksanaannya sudah bisa dicapai, walaupun hasilnya masih belum

maksimal. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang ini sebagai wujud ingin membenahi kualitas pariwisata di Kabupaten Sintang. Namun disamping itu, ketika Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang ingin tujuan tersebut tercapai sesuai harapan maka perlu dilakukan tindakan – tindakan yang lebih gencar agar tujuan tersebut dapat terealisasi. Maka dari itu perlu dispesifikan lagi agar tujuan tidak terlalu luas dan ketika di implementasikan menjadi tidak sulit.

b. Sumber Daya

Sumber Daya merupakan hal yang paling penting dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah dirumuskan. Sumber daya bukan hanya menyangkut sumber daya alam yang dimiliki, melainkan terkait manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Manusia yang berkualitas sangat dituntut dalam hal ini, karena dengan tersedia sumber daya manusia yang berkualitas akan tercermin dari berhasilnya suatu kebijakan atau program yang dilakukan. Dalam hal ini kaitannya dengan sumber daya manusia yang berkualitas maka seharusnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang harus mampu memenuhi berbagai tuntutan tersebut.

Jumlah sumber daya manusia yang harus disediakan oleh suatu dinas/organisasi sangat tergantung pada tugas yang harus dilaksanakan. Semakin kompleks suatu kebijakan maka semakin banyak pula jumlah sumber daya manusia yang harus disediakan untuk menjalankan tugas yaitu mengimplementasikan kebijakan. Sementara itu jika kebijakan yang harus diimplementasikan sederhana maka semakin sedikit pula jumlah sumber daya manusia yang diperlukan. Perkembangan teknologi yang mampu menunjang

pelaksanaan pekerjaan, terutama teknologi informasi (TI) saat ini juga akan sangat mempengaruhi ukuran tentang jumlah sumber daya manusia yang diperlukan oleh suatu dinas/organisasi. Dimasa lalu banyak pekerjaan yang harus dikerjakan secara manual sehingga jumlah sumber daya manusia menjadi penting dalam suatu dinas/organisasi. Namun demikian, keberadaan TI saat ini menjadi sangat membantu organisasi dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan.

Manusia yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang sebagai pelaksana dari kebijakan kepariwisataan pada kenyataannya belum mampu melaksanakan semua fungsi dan tugasnya masing – masing secara baik. Keadaan pegawai menurut pangkat dan golongan dimana terdapat 3 orang yang menduduki pangkat golongan IV, 26 orang menduduki pangkat golongan III, dan 14 orang menduduki pangkat golongan II, sedangkan pegawai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang bukan PNS berjumlah 21 orang terdiri dari 5 orang juru pelihara BCB dan 16 orang Tenaga Kontrak kebersihan dan supir. Dapat diambil kesimpulan bahwa pada Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang memiliki 64 pegawai dimana 21 pegawai merupakan tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sedangkan tenaga kerja yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 43 orang.

Kualitas sumber daya aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus ditingkatkan guna terwujudnya sumber daya manusia yang profesional. Hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang. Sumber daya manusia dalam implementasi peranannya

memang sangat penting, namun selain itu ada sumber daya lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu sumber daya finansial atau dana. Keterbatasan alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi penghambat gerak pengembangan objek wisata budaya Rumah Betang Ensaid Panjang.

c. Karakteristik agen pelaksana

Kinerja implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ciri – ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Artinya bahwa setiap tujuan yang ingin dicapai dari setiap kebijakan harus disesuaikan juga dengan karakteristik agen yang melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu cakupan atau wilayah implementasi kebijakan juga perlu dipertimbangkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. Kabupaten Sintang memiliki jumlah objek wisata yang cukup banyak dan memiliki cakupan wilayah yang begitu luas, sedangkan jumlah agen pelaksana yang berjumlah 64 orang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang belum mampu menjangkau semua objek wisata yang ada di Kabupaten Sintang

d. Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tindakan kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Para

pelaksana sebenarnya harus mampu menyentuh kebutuhan, keinginan bahkan permasalahan yang warga ingin selesaikan. Di objek wisata Rumah Betang Ensaid Panjang banyak sekali keinginan warga yang tinggal di rumah seperti adanya bantuan dana untuk memperbaiki Rumah Betang Ensaid Panjang baik itu untuk perbaikan lantai, atap, pagar namun pemerintah setempat khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang belum mampu memenuhi keinginan warga di rumah betang tersebut.

e. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana

Komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam menjalin sebuah kerjasama dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. Kegiatan komunikasi salah satunya dapat dilakukan dengan koordinasi. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak – pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahan – kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi.

Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang sebagai agen pelaksana kebijakan seharusnya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan aktor – aktor lain yang terlibat dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan adanya komunikasi serta koordinasi yang baik, niscaya apa yang diinginkan tidak akan tercapai. Salah satu penyebab kurang berhasilnya suatu kebijakan dikarenakan ketidakmampuan aktor kebijakan dalam berkomunikasi sehingga apa yang akan dilaksanakan menjadi tidak jelas bahkan bisa terjadi *miss communication* atau kesalahpahaman.

B. Faktor Eksternal

a. Lingkungan

Lingkungan adalah realitas diluar kebijakan publik yang mempengaruhi kebijakan publik. Kebijakan publik adalah suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik serta menyangkut orang banyak. Lingkungan alam disekitar objek wisatapun perlu diperhatikan dengan seksama agar tidak rusak dan tercemar.

Aktivitas manusia yang meningkat dari tahun ke tahun dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem dari fauna dan flora di sekitar objek wisata. Oleh sebab itu, perlu ada upaya menjaga kelestarian lingkungan melalui penegakan berbagai aturan dan persyaratan dalam pengelolaan suatu objek wisata. Lingkungan kebijakan sangat besar sekali pengaruhnya terhadap efektif atau tidaknya kebijakan yang dilaksanakan. Lingkungan lain yang juga turut menyebabkan kurang efektifnya kebijakan kepariwisataan di Kabupaten Sintang ialah kondisi geografis, kondisi ekonomi, sosial, dan politik serta budaya.

1. Kondisi geografis

Keberadaan Rumah Betang Ensaid Panjang yang jauh dari ibu kota Kabupaten Sintang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang. Letak Rumah Betang Ensaid Panjang yang berada di pedesaan serta sulitnya akses transportasi ke Rumah Betang Ensaid Panjang dengan kondisi jalan yang rusak menjadi penghambat pengembangan. Jarak memang bukan lah masalah, hanya saja dengan kondisi jalan yang rusak dapat mengurangi niat wisatawan untuk berkunjung. Ditambah lagi kondisi Desa Ensaid Panjang pada musim hujan sering terjadi banjir sehingga mengganggu

akses menuju Rumah Betang Ensaid Panjang.

2. Kondisi Ekonomi, Sosial, Politik dan Budaya

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dan budaya yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kurang efektifnya implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan ke kondusifan lingkungan eksternal. Lingkungan sosial, ekonomi, politik serta budaya merupakan hal yang menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan kurang efektifnya implementasi kebijakan yang dilaksanakan. Karena dukungan dari berbagai lingkungan tersebut dapat memberikan dampak tersendiri bagi implementasi kebijakan.

Lingkungan sosial dalam arti bahwa peran serta masyarakat dalam mensukseskan berbagai tujuan dalam kebijakan juga menjadi sangat penting. Karena tanpa adanya dukungan dari masyarakat maka kebijakan tersebut akan sulit dilaksanakan sehingga tujuan yang akan dicapai tidak berhasil. Kondisi sosial dan budaya masyarakat di Rumah Betang Ensaid Panjang yang masih kental terhadap nilai – nilai budaya suku Dayak pun menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan Rumah Betang Ensaid Panjang. Misalnya yaitu kebiasaan suku Dayak yang tidak ingin memungut biaya apabila ada wisatawan yang berkunjungpun menjadi salah satunya.

Namun walaupun begitu, lingkungan budaya inipun kelestariannya tidak boleh tercemar oleh budaya asing. Artinya bahwa harus ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan kenangan yang mengesankan bagi setiap wisatawan yang berkunjung. Masyarakat yang memahami, menghayati, dan mengamalkan hal tersebut di daerah

tujuan wisata menjadi harapan semua pihak untuk mendorong perkembangan pariwisata yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar objek wisata.

Berbagai faktor tersebut diatas seharusnya harus secara cepat dan sigap ditanggapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang sebagai dasar untuk membuat kebijakan yang lebih baik. Adapun yang dapat dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang yang pertama ialah dengan pemberlakuan tiket masuk bagi pengunjung objek wisata budaya Rumah Betang Ensaid Panjang. Dari tiket masuk tersebut hasilnya dapat membantu pendapatan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata guna mendukung pengembangan objek wisata budaya Rumah Betang Ensaid Panjang. Penyusunan kebijakan pengembangan pariwisata daerah harus memiliki dampak langsung terhadap potensi pariwisata daerah.

Kebijakan yang diambil haruslah mengakomodir kebutuhan pariwisata yang ada untuk dilakukan pengembangan. Sehingga penentuan kebijakan tersebut menjadi terarah pada potensi pariwisata dan dari kebijakan tersebut menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dalam melaksanakan pengembangan pariwisata daerah. Hasil temuan penelitian yang penulis lakukan di lapangan menunjukkan bahwa kurang berkembangnya objek wisata Rumah Betang Ensaid Panjang disebabkan karena belum adanya kebijakan strategis yang di buat oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka pengembangan potensi pariwisata yang dimiliki oleh objek wisata Rumah Betang Ensaid Panjang. Selain itu penulis menemukan adanya kesalahan pola dalam pengambilan kebijakan.

Kondisi seperti yang dipaparkan diatas yang membuat pengembangan potensi pariwisata objek wisata Rumah Betang

Ensaid Panjang menjadi terhambat dan stagnan tidak ada perubahan yang signifikan. Perlu adanya perubahan cara pengambilan kebijakan yang dilakukan agar kebijakan yang disusun dapat mengakomodir kebutuhan pengembangan pariwisata yang menjadi prioritas untuk dikembangkan. Perubahan itu dapat dilakukan dengan mengidentifikasi terlebih dahulu seluruh potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Sintang. Kemudian dianalisa potensi pariwisata mana yang paling membutuhkan untuk dikembangkan. Dengan menganalisa potensi pariwisata yang ada dapat memberikan gambaran yang jelas untuk menyusun kebijakan yang tepat dalam mengembangkan potensi pariwisata disetiap objek wisata. Sehingga kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terarah dan tepat sasaran.

Adapun faktor lain yang menyebabkan implementasi kebijakan kepariwisataan di Rumah Betang Ensaid Panjang kurang efektif ialah :

1. Komitmen Daerah

Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki komitmen dalam pengembangan sektor kepariwisataan di daerahnya. Komitmen itu ditunjukkan melalui Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang.

Adapun visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang yaitu : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Berbudaya dan Sejahtera". Dari visi tersebut secara tertulis menggambarkan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung pengembangan objek wisata khususnya Rumah Betang Ensaid Panjang. Hasil pengamatan yang penulis lakukan di objek wisata Rumah Betang Ensaid Panjang menunjukkan bahwa belum ada keseriusan dari pemerintah daerah dalam mengembangkan objek wisata tersebut.

Terdapat beberapa hal yang tentunya pemerintah belum mampu mengambil bagian dari permasalahan tersebut. Hal

ituterlihatbagaimanafasilitas yang tidak terawatdandsudahtidaklayakuntukdigunakan. Selanjutnyafasilitas yang di buattidakmendukungfasilitas yang lainnya. Selainitupemberlakuanaturan agar objekwisatadetapterjagakelestariandankeaslian nyabelumsepenuhnyadilaksanakan.Adanya berbagai masalah tersebut diatas seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Sintang lebih tanggap dan sigap dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi tersebut. Maka dari itu, komitmen pemerintah daerah Kabupaten Sintang dalam upaya pengembangan kepariwisataan seharusnya lebih ditingkatkan lagi, mengingat Kabupaten Sintang pada tahun 2016 akan menjadi Provinsi baru, yaitu Provinsi Kapuas Raya. Sehingga komitmen serta keseriusan tersebut perlu dilakukan guna mewujudkan berbagai hal yang dapat meningkatkan kualitas pariwisata di Kabupaten Sintang khususnya di Rumah Betang Ensaid Panjang dimasa yang akan datang.

2. Infrastruktur

Ketersediaaninfrastruktursangatmempengaruhi pengembangan objekwisataRumah Betang Ensaid Panjang. Infrastruktur yang baikakanmemudahkan para wisatawanberkunjungdantinggalebih lama di objekwisataRumah Betang Ensaid Panjang. Keadaan infrastruktur jalan yang rusak menuju Rumah Betang Ensaid Panjang saat ini masih menjadi hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Sintang.

Ditambah lagi letak rumah betang yang jauh dari pusat kota juga menjadi penghambat pengembangan yang dilakukan. Namun, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga tidak tinggal diam saja. UpayapengembanganobjekwisataRumah Betang Ensaid Panjangmasihdihadapkandenganterdapatbanyaknyajalan yang dalamkondisirusakmenujuobjekwisataRumah Betang Ensaid Panjang. Kondisitersebuttentumemberikankesankurang

Nurhalimah

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

baikbagiwisatawan yang berkunjungkeobjekwisataRumah Betang Ensaid Panjangkarenaperjalanannyamenujuobjekwisatabelumsepenuhnyanyamandanlancar.Alattransportasikhusus yang langsungdapatmenghantarkanwisatawanmenujuobjekwisataRumah Betang Ensaid Panjangbelumdisediakan. DisekitarlokasiobjekwisataRumah Betang Ensaid Panjang jugabelummemadainya tempatpenginapanandrestoranbagiwisatawan untukbeistirahatsertamenikmatikulinerkhasdaerah setempat, karenapenginapanletaknyaasihterpusat di kotaSintangsajadjaraknyacukupjauh. Tentuinisebuahkerugianbagipemerintahdaerah karenadengansegalapotensidankelebihan yang dimilikiobjekwisataRumah Betang Ensaid Panjangtapitidakdidukungdenganinfrastruktur yang memadai.

3. Keterlibatan Pihak Swasta

Ketidakmampuanpemerintahdaerahdalam melaksanakan pengembangan pariwisata seharusnya tidak membuat proses pengembanganpotensipariwisatajugaterhenti. Salah satutidakberjalannyapengembanganobjekwisataRumah Betang Ensaid Panjang adalahtidakadanyaketerlibatanpihakswastadalam pengelolaanobjekwisatabudaya Rumah Betang Ensaid Panjang.Ketidakterlibatannyapihakswastadalam pengembanganobjekwisatabudaya Rumah Betang Ensaid Panjangdisebabkanbelumterbukanyapemerintahdaerahuntukbekerjasamadenganpihakswasta. Sehingga minim sekalibahkantidakada investor yang ingininvestasidalam pengembanganobjekwisata Rumah Betang Ensaid Panjang, padahldalamkonsep*good governance*antarapemerintah,masyarakatdanpihakswastaharusberkoordinasidalam menjalankan program pemerintahsehinggaadakesatuanpemikiran dan pelaksanaan program yang diinginkan.

4. Kesadaran Masyarakat

Pemahaman masyarakat akan pentingnya melestarikan pariwisata berbasis lingkungan menjadi sebuah kekuatan yang besar dalam mendorong pengembangan pariwisata. Masyarakat di sekitar objek wisata adalah yang akan menyambut kehadiran wisatawan yang berkunjung tersebut. Maka dari itu, masyarakat disekitar objek wisata perlu mengetahui berbagai jenis dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh para wisatawan.

Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat sekitar objek wisata Rumah Betang Ensaid Panjang masih rendah karena dengan ada atau tidaknya pengembangan objek wisata Rumah Betang Ensaid Panjang masyarakat kurang meresponnya, sehingga tidak jarang fasilitas yang disediakan tidak dijaga dengan baik. Selain itu kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan di lingkungan objek wisata Rumah Betang Ensaid Panjang belum dibina dengan baik oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang.

Kondisi kotor yang terjadi di lingkungan objek wisata Rumah Betang Ensaid Panjang juga diakibatkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kecermatan membaca peluang usaha jasa pariwisata belum dimiliki oleh masyarakat sekitar objek wisata Rumah Betang Ensaid Panjang. Padahal jika masyarakat sadar akan peluang itu maka mereka dapat mengembangkan potensi ekonomi daerah objek wisata Rumah Betang Ensaid Panjang yang akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan sosial. Seharusnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang menyelenggarakan berbagai penyuluhan serta pembinaan kepada masyarakat yang tinggal di Rumah Betang Ensaid Panjang dalam bentuk bina rakyat sadar wisata. Dengan terbinanya masyarakat yang sadar wisata akan berdampak positif karena mereka akan memperoleh keuntungan dari para wisatawan.

Nurhalimah

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

Para wisatawanpun akan untung karena mendapat pelayanan yang memadai dan juga mendapatkan berbagai kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagai akhirdaripenelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan kepariwisataan di objek wisata budaya Rumah Betang Ensaid Panjang Kabupaten Sintang kurang efektif. Adapun faktor – faktor tersebut terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menyebabkan kurang efektifnya kebijakan kepariwisataan di objek wisata budaya Rumah Betang Ensaid Panjang Kabupaten Sintang ialah ukuran dan tujuan kebijakan yang luas, kondisi sumber daya yang kurang berkualitas, karakteristik agen pelaksana yang belum menonjol serta masih kurangnya sikap/ kecenderungan para pelaksana dan belum adanya komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana yang baik. Faktor eksternal yang menyebabkan kurang efektifnya kebijakan kepariwisataan di objek wisata budaya Rumah Betang Ensaid Panjang Kabupaten Sintang ialah keadaan lingkungan. Lingkungan kebijakan sangat besar sekali pengaruhnya terhadap kurang efektifnya kebijakan yang dilaksanakan. Lingkungan yang dimaksud dalam hal ini ialah kondisi geografis, kondisi ekonomi, sosial, dan politik serta budaya. Ada faktor lain yang menyebabkan kurang efektifnya kebijakan kepariwisataan di objek wisata Budaya Rumah Betang Ensaid Panjang, yaitu komitmen pemerintah, infrastruktur, keterlibatan pihak swasta serta kurangnya kesadaran masyarakat Desa Ensaid Panjang menjadi penyebab kurang berkembangnya Rumah Betang Ensaid Panjang. Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang belum menetapkan kebijakan yang

terarahdalam mengembangkan objek wisata Rumah Betang Ensaid Panjang sehingga kebijakan yang dikeluarkan belum tepat dengan sasaran yang diharapkan. Serta kurangnya komitmen pemerintah dalam bentuk bantuan dana untuk mengembangkan objek wisata Rumah Betang Ensaid Panjang pun dinilai masih kurang. Kondisi objek wisata Rumah Betang Ensaid Panjang masih sangat memprihatinkan karena keberadaan Rumah Betang Ensaid Panjang yang belum tersentuh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang dalam pengembangan yang optimal dan potensi yang dimiliki belum terkelola dengan baik.

2. Saran

F. REFERENSI

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Bonifasius. 2007. *Skripsi: Implementasi Program Pengembangan Wisata Pancur Aji di Kabupaten Sanggau*. Pontianak.
- Ismayanti. 2010. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kustiawan, Andri. 2012. *Skripsi. Strategi Pengembangan Objek Wisata Bukit Kelam Kabupaten Sintang*. Pontianak.
- Moleong J. Lexy, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- , 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang perlu mengubah pola pengambilan kebijakan dalam mengembangkan objek wisata budaya Rumah Betang Ensaid Panjang agar pengembangannya dapat dilaksanakan secara optimal. Perlu disusun kembali kebijakan pengembangan objek wisata Rumah Betang Ensaid Panjang yang berorientasi pada perubahan dan agresif. Menyediakan fasilitas pendukung kegiatan wisata di objek wisata Budaya Rumah Betang Ensaid Panjang sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada pengunjung. Selain itu perlu diberi penunjuk arah agar wisatawan tahu keberadaan Rumah Betang Ensaid Panjang.
- , 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, Agus Erwan & Sulistyastuti, Ratih Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Wahab, Salah, 1992. *Manajemen Kepariwisata*, Pradya Paramita, Jakarta
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- , 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar – Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI.

Ubargi, Tri Syahrul. 2013. *Efektivitas Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Sintang*. Pontianak.

------. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta:CAPZ

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Buku Seru.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : NURHALIMAH
NIM / Periode lulus : ED1110009 / PERIODE III TAHUN AKADEMIK 2013/2014
Fakultas/Jurusan : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK / ILMU ADMINISTRASI
E-mail address/HP : nurzholah@yahoo.co.id / 085252486391

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....PUBLIKA.....*) pada Program Studi.....ILMU ADM NEGARA..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul (**):

SUMBER DAYA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPARIWISATAAN
DI OBJEK WISATA BUDAYA RUMAH BETANG ENSAID PANJANG
KABUPATEN SINTANG

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal7-4-2014.....

Dr. Arifin, S. Sos, M. AB
NIP. 1971050219977021002

Dibuat di : PONTIANAK
Pada tanggal: 03 MEI 2014

(NURHALIMAH)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai pradi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologi)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di-scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).